

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Bukti pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah diberikannya wadah bagi UMKM dan Koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UK. Dalam analisis makro ekonomi, UMKMemiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 bab III pasal V yang berbunyi “ meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. Kemampuan UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia sudah terbukti sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi tersebar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman pada saat krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Singgih, 2007:218). Saputro, dkk. (2010:140-145) melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 55.56% berdasarkan data Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2008.

Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2016 menyatakan

bahwa UMKM di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Dengan kata lain, UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara (Tuti dan Dwijayanti, 2014:158). Namun, permasalahan internal UMKM adalah rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan maupun pasar, dan kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Sedangkan permasalahan eksternal adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum memihak bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya pembinaan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hafsah, 2001). Banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya (Tuti dan Dwijayanti, 2014:158). Rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. (Pradipta, 2015: 859-860).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peran yang besar di dalam perekonomian nasional, terbukti selain memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto yaitu pada tahun 2013 sebesar

60% atau senilai Rp 5.444 triliun, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yaitu pada tahun 2013 sebanyak 114 juta atau 96% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2014). UMKM merupakan penyelamat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998, dan krisis ekonomi global tahun 2008. Disaat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Jumlah UMKM di Indonesia merupakan yang paling besar dibanding negara-negara lain, pada tahun 2014 jumlah pelaku UMKM di Indonesia terdapat sekitar 57,9 juta (Sari, 2014). Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan bahwa UMKM mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini.

Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa pada tahun 2016, Indonesia telah menghadapi Asean Economic Community (AEC), dimana persaingan pasar akan semakin tinggi bagi pelaku UMKM. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Untuk dapat mengembangkan usahanya, UMKM membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Namun, sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisah antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Pemerintah telah menyediakan program pembiayaan UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya untuk

membantu UMKM untuk meningkatkan usahanya. Namun realisasi KUR pada tahun 2015 yang ditargetkan sebesar Rp 30 triliun tidak mencapai target, terserap sebesar 75,8% (Novalius, 2016). Bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

Laporan keuangan merupakan persyaratan yang penting bagi UMKM untuk dapat mengakses pinjaman dari perbankan (Yanto dkk., 2016). Baas dan Shrooten (2006 dalam Rudiantoro dan Siregar, 2012) menyebutkan bahwa perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM menggunakan *soft information* dan *hard information*. *Soft information* menggunakan teknik *relationship lending* yakni penyaluran kredit atas dasar kepercayaan dan hubungan yang telah terbina baik antara bank dengan pengusaha. *Hard information* diantaranya menggunakan : (1) *Financial statement lending*, yakni dengan menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian kredit; (2) *Assets based lending*, yakni dengan menggunakan informasi terkait aset-aset yang dijadikan jaminan; dan (3) *Creditscoring*, yakni penggunaan teknik statistik dengan menggunakan data-data keuangan dari laporan keuangan dan juga *credit worthiness* (kelayakan kredit) dan latar belakang dari pemilik UMKM untuk diberikan peringkat.

Penyebab UMKM tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya yaitu karena kurangnya sumber daya manusia

yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta UMKM terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati, 2012). Selain itu karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, serta anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009 dalam Rudiantoro dan Siregar, 2012). Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai standar (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar maka dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang reliabel dan akuntabel mengenai posisi keuangan UMKM, sebagai bahan untuk menilai kinerja UMKM, dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan UMKM (Armando, 2015).

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memang cocok untuk diterapkan pada badan usaha dengan skala besar namun tidak sesuai dengan keadaan di badan usaha dengan skala UMKM. Pada 17 Juli 2009, untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku

efektif pada 1 Januari 2010. Meskipun SAK ETAP wajib diimplementasikan pada Januari 2010, UMKM masih kesulitan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar (Yanto dkk., 2016). SAK ETAP tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM, masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pembukuan yang sesuai dengan standar.

Penelitian Alfitri dkk. (2014) yang meneliti tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM perajin mebel desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuaidengan pemahaman dan kebutuhan, dan UMKM tidak menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan. Kendala- kendala perajin mebel dalam menerapkan SAK ETAP adalah karena kurangnya pengetahuan tentang SAK ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang profesional, kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan kurang efektifnya sosialisasi dari pihak berkompeten tentang SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh (Debbianita and Sitorus 2016) terdapat perbedaan tingkat pengetahuan SAK ETAP pada pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dimana pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini dapat disebabkan oleh pelaku UMKM yang memiliki latar belakang akuntansi sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pembukuan, pencatatan akuntansi dan pembuatan

laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga pada saat diperkenalkannya SAK ETAP, pelaku UMKM tersebut akan mempelajari dan menerapkannya dalam usaha yang dijalankan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM terkait SAK ETAP telah dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012), hasil penelitian tersebut menyatakan pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, jenjang pendidikan terakhir pengusaha, dan lama usaha berdiri berpengaruh terhadap pemahaman UMKM terkait SAK ETAP.

Penelitian terdahulu oleh Rahmawati & Puspasari, (2017) Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan mengatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, (2014) menunjukkan ukuran usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kudus (Rahmawati & Puspasari, 2017).

Penelitian terdahulu (Hastusi, Wijayanti and Chomsatu 2017) Pengaruh Jenjang Pendidikan dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dan pemahaman teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Variabel jenjang pendidikan yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, sedangkan variabel pemahaman teknologi informasi tidak

berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hampir sebagian besar pengrajin Batik dikampung batik 29 laweyan sudah melakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan cukup baik (Hastusi, Wijayanti and Chomsatu 2017).

Penelitian oleh Mulyani (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Di Kabupaten Kudus adalah ukuran usaha dimana berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruh Penggunaan Standar Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik masalah penelitian ini adalah :Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) Pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan dari masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan SAK ETAP Pada UMKM di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur?
- b. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap penggunaan SAK ETAP Pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur?
- c. Apakah skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan SAK ETAP Pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap Penggunaan SAK ETAP pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur.
2. Mengetahui pengaruh faktor umur usaha terhadap penggunaan SAK ETAP pada UMKM di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur.
3. Mengetahui pengaruh faktor skala usaha terhadap penggunaan SAK ETAP pada UMKM Di Kelurahan Hambala Kabupaten Sumba Timur.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan beberapa manfaat yaitu: berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pihak peneliti, dapat memperoleh pengetahuan tentang pelaporan keuangan UMKM, dapat memperoleh pemahaman bagaimana karakteristik pelaku usaha mengenai pentingnya pelaporan keuangan dalam UMKM,
2. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Sumba Timur.